

edisi 133 tahun 2024

TC MEDIA

INSPIRASI UNTUK BERSINERGI

hadir
dengan
tampilan
baru

Tentang Pajak **H.25**

**Mengenal Surat
Keterangan
Sengketa Pajak**

Teknologi Informasi **H.35**

**Menjaga Organisasi
dari Ancaman Siber
dengan Menerapkan
Join Domain**

Profil **H.27**

PROMOSI & MUTASI

Pegawai di
Lingkungan
Sekretariat
Pengadilan
Pajak

Fokus **H.10**

PENYEGARAN & PERAYAAN

Liputan khusus HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN dan
perayaannya di Pengadilan Pajak





LAYANAN BEBAS BIAYA

Seluruh layanan di Pengadilan Pajak **tidak dipungut biaya apapun**. Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terhadap seluruh pelayanan yang diberikan petugas kami.

Terima kasih
sudah membantu
kami dengan
**tidak memberikan
imbalan atau
gratifikasi**

Bebas **biaya**,
tidak ada **gratifikasi**



coverstory



Kami merancang *cover* TC Media kali ini dengan menampilkan foto-foto para pejabat yang baru menempati beberapa posisi di Sekretariat Pengadilan Pajak (Set. PP). Penampilan para pejabat baru juga mempresentasikan penyegaran yang terjadi di dalam organisasi yang mana penyegaran tersebut diharapkan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Talent: para pejabat baru di Set.PP

Foto: berbagai macam sumber di Kementerian Keuangan

Desainer: Roy Pasha

Penyegaran untuk Melangkah Maju

Bangsa Indonesia sedang memasuki fase perubahan besar sejak kemerdekaan, yaitu fase perpindahan Ibu Kota Negara dari semula Jakarta menjadi Nusantara atau lebih dikenal dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak berlebihan rasanya jika kami menyebut ini sebagai peristiwa penyegaran karena IKN dibangun di atas pembukaan lahan baru dengan desain arsitektur baru dan fasilitas-fasilitas terkini. Tahun 2024 menjadi tahun yang istimewa karena untuk pertama kalinya Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 diadakan di IKN. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi spirit dan fokus dalam edisi TC Media kali ini.

Pada edisi kali ini, TC Media juga mengalami peristiwa istimewa, yaitu penyegaran desain tampilan yang cukup signifikan, mulai dari logo, format tata letak, desain halaman, penggunaan huruf (*font*), hingga pemilihan warna. Semuanya diawali dengan *redesign* logo TC Media yang kemudian menjadi identitas visual yang diimplementasikan ke dalam elemen-elemen grafis dalam TC Media. Penyegaran ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menyuguhkan pengalaman membaca yang lebih baik dan nyaman.

Masih mengenai penyegaran, TC Media kali ini menyuguhkan artikel berkenaan dengan penempatan beberapa posisi pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak (Set. PP). Satu di antaranya merupakan posisi yang strategis, penting, dan sudah beberapa bulan tidak ditempati (kosong). Hal ini merupakan hasil dari proses promosi dan mutasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan menjadi menarik karena beberapa posisi tersebut diisi oleh pegawai yang tidak berasal dari Set. PP sendiri melainkan dari unit eselon 1 lain di Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, terjadi penyegaran di beberapa posisi pejabat Set. PP.

Selain artikel mengenai penyegaran dan perayaan, para pembaca juga disuguhkan artikel-artikel lain yang menarik untuk diikuti, seperti pengenalan Surat Keterangan Sengketa Pajak, informasi mengenai Putusan Kembali POS, transportasi publik kaum urban, hubungan *join domain* dengan keamanan informasi, dan beberapa kegiatan Pengadilan Pajak. ■

Pengarah I

Sekretaris Pengadilan Pajak

Pengarah II

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

Penanggung Jawab

Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Redaktur Umum

Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi

Redaktur Pelaksana

Gilang Pratama

Penyunting

Rizki Damayanti

Desain Grafis dan Fotografer

Faishal Chairu Noor
Ridwan Firmansyah
Ariyan Bayu Wijaya

Tim Redaksi

Gabriella Grace
Heru Nugroho
Mega Nurmalasari
Sukindar Ari Santoso
Astris Dyah Perwita
Felixita Novelia Christiana Dewi
Rahma Noor Fadhila
Risya Ayu
Audrey Ruth Selena
Rehana Harahap

Diterbitkan oleh



Sekretariat
Pengadilan Pajak



setpp.kemenkeu.go.id



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



[tcmedia_pp](https://www.instagram.com/tcmedia_pp)



[SetPPKemenkeu](https://www.youtube.com/SetPPKemenkeu)

Beberapa foto artikel bersumber dari internet dengan *free license* disertai *attribution*, seperti [freepik.com](https://www.freepik.com)

DAFTAR ISI

3 editorial
Perubahan untuk
Melangkah Maju

5
foto kita

7-8 lintas peristiwa



Refreshment
e-Tax Court
Internal
(e-Putusan)



Bimbingan
Teknis E-Tax
Court bagi
Pemerintah
Daerah



Flag Off Setjen
Road to HORI
Tahun 2024



Amazing
4Friendship
(Kegiatan Para
Pejabat
Pengawas)



Mindfulness
bersama
Adjie
Santosoputro



Lomba 23-an

23 infografis

Informasi
Putusan
Kembali POS

25 tentang
pajak

Mengenai Surat
Keterangan
Sengketa Pajak

10-15

fokus
Penyegaran & Perayaan



10 fokus 01

Peringatan HUT
RI ke-79 di IKN



14 fokus 02

Pesta Kemerdekaan
di Pengadilan Pajak

16-22

lokus

16 lokus 01

ACFE : Association of
Certified Fraud Examiners

18 lokus 02

Road to Kemenkeu Mengajar 9,
Are You Ready?

27-32

profil

Promosi &
Mutasi



33

Rona

Transportasi
Publik: Solusi
Mobilitas
Kaum Urban

35

teknologi
informasi

Menjaga Organisasi
dari Ancaman Siber
dengan Menerapkan
Join Domain

36

komik

Wakil Menteri
Keuangan II
sebagai Inspektur
Upacara 17 Agustus
di Kantor Pusat
foto: Humas Setjen

Pasukan Pengibar
Bendera Merah Putih
pada upacara 17 Agustus
di Kantor Pusat
foto: Humas Setjen





▲ Suasana Upacara 17 Agustus di Kantor Pusat
foto: Humas Setjen

▼ Amazing 4Friendship
foto: Roy

Bimbingan Mental oleh
Sekretaris Pengadilan Pajak
foto: Bagian Umum





Refreshment e-Tax Court Internal (e-Putusan)

5 dan 7 Agustus 2024

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai fitur e-Putusan pada e-Tax Court, Tim Kerja e-Tax Court

mengadakan *refreshment* internal pada tanggal 5 dan 7 Agustus 2024 silam yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Majelis. Acara dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan menghimbau agar fitur e-Putusan dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disampaikan mengingat kedepannya berkas sengketa yang diajukan secara manual tetap dapat dilakukan pengucapan melalui e-Tax Court. ■ (Audrey)



Bimbingan Teknis e-Tax Court Bagi Pemerintah Daerah

8 Agustus 2024

Demi meningkatkan pemahaman Termohon Terdaftar, dalam hal ini pemerintah daerah mengenai sistem e-Tax Court, Set. PP mengundang empat belas pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk menghadiri bimbingan teknis e-Tax Court secara daring pada hari Kamis, 8 Agustus 2024. Pada dalam bimbingan teknis ini, disajikan materi mengenai proses bisnis e-Tax Court oleh subtim probis serta dilakukan *live demo* aplikasi untuk memberikan gambaran kepada perwakilan pemerintah daerah dalam penggunaan sistem. ■ (Audrey)



Flag Off Setjen Road to HORI Tahun 2024

9 Agustus 2024

Dalam rangka menyambut Hari Oeang (HORI) ke-78, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan *Flag-Off* Setjen Road To HORI pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 di Lapangan Voli Kemenkeu. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, berharap bahwa dengan diadakannya acara ini, semangat para pegawai dalam menyambut HORI juga turut bangkit. Adapun rangkaian acara meliputi senam bersama, penyampaian arahan, pertandingan voli ekshibisi, serta sarapan bersama seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. ■ (Audrey)



4Friendship (Kegiatan Para Pejabat Pengawas)

9 Agustus 2024

Paguyuban pejabat Eselon IV Set. PP atau yang lebih dikenal dengan nama 4Friendship, melaksanakan kegiatan *outing* bersama pada Jumat, 9 Agustus 2024. Rangkaian acara meliputi penyampaian arahan mengenai transisi dan mutasi oleh Sekretaris Pengadilan Pajak sebelum akhirnya berangkat menuju Green Peak Hotel, Bogor. Pada malam harinya dilaksanakan makan malam sekaligus ramah tamah bersama anggota lama dan anggota yang baru bergabung. Kegiatan ini dihadiri oleh 46 peserta dan diakhiri dengan kegiatan *offroad* bersama. ■ (Audrey)



Mindfulness bersama Adjie Santosoputro

16 Agustus 2024

Pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, Set. PP mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai bertajuk “Sejenak Bersama Adjie Santosoputro: Berdamai dengan Rasa Cemas” di Aula BKF Kemenkeu. Diikuti oleh 200 pegawai, acara dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan dilanjutkan dengan paparan oleh Adjie Santosoputro, seorang praktisi *mindfulness*. Adjie membahas pentingnya *mindfulness* dalam menghadapi kekecewaan, stres, dan ketidakpastian, serta mengajak pegawai melatih *mindfulness* bersama. ■ (Audrey)



Lomba 23-an

23 Agustus 2024

Memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, Pengadilan Pajak mengadakan “Lomba 23-an” pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 di lapangan Gedung A. Acara dimulai pada pukul 06.30 WIB dengan senam pagi, sarapan, lomba 17-an, *booth eco-office*, dan juga aksi *charity*. Kegiatan ini turut diramaikan oleh seluruh hakim, pejabat, dan pegawai yang mengenakan pakaian merah putih. Tak lupa, peserta juga diingatkan untuk membawa *tumbler* demi mendukung gerakan *eco-friendly*. ■ (Audrey)

PERINGATAN HUT KE-79 RI DI **IKN**

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 diadakan di halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara ini juga diikuti secara *hybrid* dari halaman Istana Merdeka, Jakarta, dan berlangsung dengan penuh khidmat dan lancar.

Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin jalannya upacara. Peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju,” yang menggambarkan momen awal dari tiga transisi besar Indonesia: perpindahan ibu kota, pergantian pemimpin, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Komandan upacara yang bertugas adalah Kolonel Inf. Nur Wahyudi, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Satuan (Dansat) 81 Kopassus. Prosesi dimulai dengan laporan dari komandan upacara dan dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali di kawasan IKN, disertai bunyi sirene panjang yang menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

Setelah itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membacakan naskah proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno 79 tahun lalu, menandai kemerdekaan Indonesia. Usai pembacaan proklamasi, Presiden Jokowi memimpin peserta upacara untuk mengheningkan cipta, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa

oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Livenia Evelyn Kurniawan, anggota Paskibraka dari Kalimantan Timur, membawa bendera Merah Putih untuk dikibarkan. Anggota Paskibraka lainnya yang bertugas adalah Akmal Faiz Ali Khadafi sebagai pembentang bendera, Try Adyaksa S. sebagai pengerek bendera, dan Fifandra Ardiansyah Daud sebagai Komandan Kelompok 8. Pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya berjalan lancar, dan bendera berkibar dengan gagah di halaman Istana Negara, IKN.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta, serta tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang meramaikan suasana di halaman Istana Negara, IKN. Perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini diharapkan menjadi momen tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga untuk menandai transisi pemerintahan dan ibu kota baru menuju visi Indonesia Emas 2045.





sumber foto: ANTARA NEWS

Perdana dan Berbeda

Upacara itu menjadi yang pertama dilaksanakan di dua istana negara di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan upacara HUT ke-79 RI diadakan di IKN sejak tahun 2022 dan mewujudkannya. Mengenai alasan diadakannya upacara kenegaraan di dua kota, Basuki Hadimuljono yang merangkap sebagai Menteri PUPR sekaligus Plt. Kepala Badan Otorita IKN menyatakan hal tersebut untuk menunjukkan adanya transisi antara ibu kota lama ke ibu kota baru. Anggaran pelaksanaan upacara HUT ke 79 RI tahun ini meningkat dari 52 Miliar menjadi 87 Miliar karena diadakan di dua lokasi. Pada tahun depan, upacara HUT RI sepenuhnya akan dilaksanakan di IKN.

Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi antar Pulau

Kirab adalah iring-iringan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi yang selama ini disimpan di Monumen Nasional menuju Istana Merdeka tempat upacara HUT RI biasanya berlangsung. Mulai tahun ini perjalanan kedua duplikat artefak penting tersebut menjadi ribuan



sumber foto: ANTARA NEWS

kali lebih panjang karena harus melintasi Laut Jawa untuk dapat diterima oleh Paskibraka di IKN. Rute kirab tersebut yang telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2024 dimulai dari Monumen Nasional lalu melintasi Jl. M.H. Thamrin – Bundaran Hotel Indonesia – Jl. Jend. Gatot Subroto – Cawang lalu terbang bersama pesawat militer di Bandara Halim Perdanakusuma yang mendarat di Bandara Sepinggan hingga diterima Paskibraka Nasional 2024 di IKN. Rute sebaliknya dilaksanakan untuk Kirab Pengembalian Duplikat Bendera Pusaka dan Naskah Proklamasi pada 31 Agustus 2024. Perjalanan pergi-pulang bendera dan naskah

proklamasi tersebut terbuka untuk umum dan disertai hiburan bagi penonton.

Hoaks Seputar Peringatan HUT ke-79 RI

Di dunia maya, netizen Indonesia digegerkan dengan berita miring tentang penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI di IKN tahun 2024. TCMedia mengumpulkan beberapa hoaks berikut bantahannya.

Pertama, Hoaks mengenai isu jilbab pembawa baki Sang Saka Merah Putih. Tersiar kabar Maulia Permata Putri dari Sumatera Barat digantikan oleh Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur. Namun, klaim bahwa pergantian ini terkait isu penggunaan jilbab adalah tidak benar. Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, menyatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Semua petugas Paskibraka secara bergantian melaksanakan perannya dalam setiap latihan dan susunan final petugas upacara diumumkan pada pagi hari di tanggal 17 Agustus, dan BPIP memperbolehkan penggunaan jilbab bagi petugas wanita.

Lalu ada pula Hoaks mengenai penggunaan jasa pawang hujan dari Banyuwangi untuk mengendalikan cuaca di IKN. Hal tersebut dibantah Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong, beliau menyatakan bahwa pemerintah menggunakan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah saat upacara HUT ke-79 RI, bukan dengan menggunakan pawang hujan. Ia menegaskan rekayasa cuaca dianggap perlu karena curah hujan di IKN cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Hoaks lain yang mendiskreditkan keadaan upacara bendera IKN adalah beredarnya video paskibraka yang berlumuran lumpur ketika bertugas yang mengesankan lapangan upacara belum siap dan tidak memadai. Faktanya video tersebut adalah upacara penurunan bendera kemerdekaan di Kabupaten Halmahera Barat, bukan di IKN.

Hadirin di Lokasi Peringatan HUT RI

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Istana mengundang partisipasi masyarakat yang ingin mengikuti secara langsung peringatan kemerdekaan RI bersama Presiden. Undangan masing-masing berjumlah seribu orang untuk pagi dan sore hari. Sebagian besar undangan diperuntukkan bagi tokoh-tokoh IKN dan warga sekitar seperti dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Selain itu, undangan juga diberikan kepada sejumlah menteri, pejabat daerah, tokoh nasional, dan duta besar negara sahabat.

Herdianto (41), warga Sepaku, Kalimantan Timur, merasa senang bisa hadir sebagai salah satu undangan dalam upacara HUT RI. Ia mendapatkan undangan dari pihak kelurahan, dengan sekitar enam hingga sepuluh warga lokal per RT yang diundang. Upacara HUT ke-79 RI diadakan di dua lokasi: Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta, dengan sekitar 1.300 undangan di IKN. Presiden Joko Widodo awalnya berencana mengundang 8.000 tamu, namun jumlahnya dikurangi karena keterbatasan akomodasi di IKN yang masih dalam tahap pembangunan.

Para tamu menerima cinderamata berupa tas jinjing besar multifungsi yang dapat diubah menjadi jaket dengan warna yang sama. Selain itu, mereka juga mendapatkan topi cokelat tua, kaus abu-abu muda, totebag abu-abu tua, dan buku catatan abu-abu. ■ (Shuk)



sumber foto: ANTARA NEWS

PESTA KEMERDEKAAN DI PENGADILAN PAJAK

“.... Merdeka... Sekali merdeka tetap Merdeka...”

Demikianlah penggalan dari salah satu lagu yang biasa kita dengar ketika memasuki bulan Agustus yang merupakan bulan penyambutan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2024 ini, Indonesia memasuki usia kemerdekaan-nya yang ke-79. Suatu angka yang tentunya diharapkan menunjukkan kedewasaan dan khidmat dalam hal bernegara.

Selain perenungan akan makna kemerdekaan itu sendiri, euforia lainnya yang dirasakan oleh warga Indonesia adalah dalam hal pesta kemerdekaan. Pemerintah selalu menjadikan tanggal 17 Agustus sebagai hari libur nasional sehingga masyarakat Indonesia dapat merayakan kemerdekaan Indonesia. Banyak variasi daripada pertandingan yang umumnya dilaksanakan seperti lomba makan kerupuk, lomba balapan karung, lomba membawa kelereng dengan sendok, lomba

memasukkan paku ke dalam botol dan juga lomba panjat pinang.

Euforia pesta kemerdekaan juga umum dilakukan di lingkungan perkantoran. Dan pada tanggal 23 Agustus 2024 lalu, Pengadilan Pajak turut mengadakan perayaan hari kemerdekaan yang diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai jenis lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Pajak.





Acara ini merupakan kolaborasi yang dilakukan antara BAPORS, Tim Perspektif, Duta Eco Office, dan Duta Transformasi. Rangkaian acara dimulai dengan senam dilanjutkan dengan sarapan dan diakhiri dengan berbagai perlombaan. Selain itu, juga terdapat kegiatan amal yang dilakukan dari awal bulan Agustus dalam rangka merayakan hari kemerdekaan.

Usai pelaksanaan senam dan sarapan bersama, acara kemudian dipimpin oleh dua MC kondang Pengadilan Pajak, yaitu duo Ihza dan Bagus. Hal lain yang menyita perhatian adalah kehadiran Dino, maskot dari Pengadilan Pajak yang diperankan oleh Hilmy dari Majelis VII. Dalam acara tersebut, MC mengumumkan satu peserta terheboh yang mengikuti senam dan kemenangan ini diperoleh Bapak Chasper, PSP Majelis VIIB.

Perlombaan diawali dengan lomba memasukkan "Galon Kait", dimana dalam lomba ini diikuti oleh 25 peserta dengan masing-masing tim terdiri dari satu orang yang akan memasukkan galon ke kaitan dan satu orang lainnya akan berdiri di dekat orang sebelumnya untuk membantu mengarahkan sehingga dapat memasukkan galon ke dalam kaitan yang disediakan. Terdapat lima kali putaran dan dalam hal ini setiap pemenang dari setiap sesi akan diadu kembali di sesi final untuk memperoleh tiga pemenang. Dari pertandingan galon kait,

salah satu pemenang pada babak penyisihan yang menyita perhatian adalah Ageng dari Majelis XVIII, dimana ia dapat memasukkan galon ke dalam kait dalam waktu kurang dari dua puluh detik. Lomba ini tentunya memerlukan komando yang jelas dan kemampuan mendengar yang baik.

Kemudian rangkaian lomba dilanjutkan dengan lomba memasukkan paku ke dalam botol yang dilakukan melalui kerjasama lima sampai enam orang peserta secara bersamaan. Seluruh peserta membelakangi botol dan berusaha saling bekerjasama untuk mengatur panjang tali sehingga dapat secara bersama sama memasukkan paku ke dalam botol. Adapun komando datang dari salah satu rekan yang akan mengarahkan dan apabila telah selesai akan menaikkan bendera yang diberikan. Dibutuhkan kemampuan untuk mendengar dengan baik, komando yang jelas dan tentunya kesiapan dalam menahan sakit di area kaki karena rata-rata peserta harus bersikap setengah jongkok.

Lomba terakhir merupakan lomba yang penuh dengan strategi dan taktik, yaitu voli air. Para peserta akan melemparkan bola voli yang dibuat dari balon berisi air. Kemudian net yang digunakan merupakan kain hitam sehingga dalam pihak lawan tidak tahu ke arah mana pemain lainnya akan melemparkan balon air tersebut. Hal yang dapat dipetik dari permainan ini adalah untuk senantiasa tetap waspada dan memiliki komunikasi yang baik satu dengan lainnya sehingga memudahkan untuk berkoordinasi guna menghalangi jatuhnya balon air supaya tidak pecah dan akhirnya menguntungkan pihak lawan. (Tirta)



ACFE : *Association of Certified Fraud Examiners*

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) merupakan sebuah organisasi global yang berfokus pada memerangi tindak penipuan dan korupsi. Organisasi yang didirikan pada tahun 1988 oleh Dr. Joseph T. Wells ini bertujuan untuk membantu para profesional dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelidiki penipuan dengan memberikan pelatihan, sertifikasi, dan sumber daya yang berharga. Melalui pelatihan terbaik, menawarkan sertifikasi CFE, dan membina komunitas profesional anti-penipuan yang dinamis dan global, ACFE berperan aktif dalam mengurangi penipuan dan korupsi di seluruh dunia.

Salah satu sertifikasi terkenal yang ditawarkan ACFE adalah *Certified Fraud Examiner* (CFE). Ini merupakan gelar yang sangat dihargai dan menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan khusus dalam bidang pencegahan dan investigasi terkait tindak penipuan dan korupsi (*fraud*). Untuk mendapatkan sertifikasi ini, harus melewati beberapa ujian yang

mencakup topik-topik penting seperti akuntansi, hukum, dan teknik investigasi serta pengetahuan terkait *fraud* dan pencegahannya.

Namun tidak harus menjadi CFE untuk bergabung dalam keanggotaan ACFE, sebagai *Associate* kita juga bisa mendapatkan materi pendidikan yang

“ Dengan kata lain, jika Anda berbohong untuk merampas uang atau properti seseorang atau organisasi, Anda sedang melakukan *fraud*. ”

berkualitas dan mengikuti berbagai seminar terkait pencegahan dan penanganan *fraud*. Penulis merasa mendapatkan banyak sekali pengalaman serta ilmu sebagai anggota ACFE, salah satunya adalah terkait *Fraud*. *Fraud* adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan.

Penipuan menjadi sebuah kejahatan ketika itu adalah

penyampaian informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta material untuk memaksa orang lain bertindak yang merugikan dirinya sendiri (*Black's Law Dictionary*). Dengan kata lain, jika Anda berbohong untuk merampas uang atau properti seseorang atau organisasi, Anda sedang melakukan *fraud*.

Salah satu yang dijelaskan dalam pelatihan adalah “mengapa seseorang melakukan tindakan *fraud*?”

Dalam pelatihan dijelaskan menurut Dr. Donald Cressey, mengapa seseorang mungkin terlibat dalam penipuan melalui model *Fraud Triangle* adalah sebagai berikut:

1. Tekanan Keuangan (*Financial Pressure*):

Kebutuhan atau tekanan keuangan yang besar dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Ini bisa berupa masalah keuangan pribadi, utang yang besar, atau tekanan ekonomi lainnya yang membuat seseorang merasa terpaksa untuk melakukan *fraud* sebagai solusi.

2. Kesempatan (*Opportunity*):

Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi. Ini termasuk kelemahan dalam sistem kontrol internal, kurangnya pengawasan, atau akses ke informasi atau sumber daya yang memungkinkan *fraud*.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*):

Rasionalisasi adalah proses mental di mana pelaku *fraud* membenarkan tindakan mereka sendiri. Mereka mungkin meyakinkan diri mereka bahwa tindakan mereka tidak salah, bahwa mereka berhak atas uang tersebut, atau bahwa mereka akan membayar kembali di kemudian hari.

Ketika ketiga faktor ini ada secara bersamaan, risiko terjadinya *fraud* menjadi lebih tinggi. Model *Fraud Triangle* membantu dalam memahami dinamika di balik perilaku penipuan dan dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.

Kemudian, Penulis ditugaskan untuk mengikuti ujian sertifikasi dalam rangka membantu organisasi dalam melakukan pencegahan dan



penanganan *fraud* yang salah satunya agar dapat melaksanakan mitigasi risiko terkait *fraud*.

Langkah pertama sebelum mengikuti ujian sertifikasi adalah dengan menjadi anggota dan mengikuti pelatihan, pelatihan terbagi menjadi empat bagian yaitu terkait Akuntansi, Hukum, Investigasi dan *Fraud*. Setelah menjadi anggota, penulis mendapatkan akses ke berbagai sumber daya pengetahuan yang sangat berharga, termasuk publikasi terkini, webinar, dan forum diskusi dengan para profesional lain di bidang *anti-fraud*.

ACFE menyediakan berbagai bahan studi dan panduan untuk membantu anggotanya mempersiapkan ujian. Penulis memanfaatkan buku-buku teks, materi online, dan kursus pelatihan yang ditawarkan. Sebagai anggota ACFE, penulis terus mendapatkan manfaat dari berbagai sumber daya dan peluang yang ditawarkan. Konferensi tahunan, seminar, dan publikasi reguler membantu penulis tetap *up-to-date* dengan tren terbaru dan teknik terbaik dalam pencegahan *fraud*. Penulis juga dapat berpartisipasi dalam kelompok kerja dan forum diskusi, yang memungkinkan penulis untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman profesional lainnya. ■ (Felix)

ROAD TO KEMENKEU MENGAJAR 9, ARE YOU READY?

#KMPedia Kemenkeu Mengajar: Dari Kami untuk Negeri

Kemenkeu Mengajar (KM) merupakan kegiatan kerelawanan yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk mengajar kepada pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini merupakan hasil inisiatif Pegawai Kemenkeu dalam rangka menginspirasi hingga penjuror negeri. Pada penyelenggaraannya, pelajar akan diajarkan bagaimana peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri, serta apa saja profesi yang ada di Kemenkeu. Selain itu, relawan dari Kemenkeu juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat yang dibawa oleh Kemenkeu, yakni keberagaman, toleransi, dan inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun visi Kemenkeu Mengajar adalah menjadi penggerak yang membantu meningkatkan *Institutional Ownership* dan citra Kemenkeu yang dekat dengan masyarakat. Sedangkan misi Kemenkeu Mengajar adalah untuk meningkatkan

kepedulian sosial berbasis kesukarelaan di lingkungan luar Kemenkeu, menimbulkan kebanggaan dan *institutional ownership* bagi para pegawai Kemenkeu, dan meningkatkan *awareness* baik pelajar maupun tenaga pendidik terhadap peranan negara, khususnya Kemenkeu.

Sementara itu, tujuan dari Kemenkeu Mengajar adalah mengenalkan peranan Kemenkeu pada pelajar, mengaktivasi semangat kerelawanan di lingkungan birokrasi, membangun citra baik institusi, menjaga stabilitas *work-life balance*, memberikan motivasi untuk berkontribusi kepada negeri dan Meningkatkan *awareness* para siswa terhadap isu perekonomian Indonesia, khususnya dengan bahasa yang sederhana. Sedangkan yang menjadi nilai-nilai dasar Kemenkeu Mengajar adalah sukarela, sinergi, semangat dan bermanfaat.

Napak Tilas Kemenkeu Mengajar Sejak 2016

Berawal dari sebuah inisiatif kecil para pegawai Kemenkeu, program ini didasari oleh keyakinan dan harapan untuk membangun generasi muda yang lebih baik bagi bangsa. Semangat para pegawai Kemenkeu untuk turut serta dalam Kemenkeu Mengajar begitu luar biasa. Sejak awal peluncurannya, program ini mendapatkan animo yang tinggi. Para relawan pengajar dengan penuh antusiasme mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Seiring berjalannya waktu, Kemenkeu Mengajar terus berkembang dan menunjukkan dampak positifnya. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang peran Kemenkeu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, akuntabilitas, dan cinta tanah air kepada para pelajar.

“KM9 bukan hanya tentang menyampaikan materi peningkatan literasi keuangan, tetapi juga bertujuan untuk membangun interaksi yang positif dan inspiratif antara para relawan pengajar dengan para siswa.”

Dimulai dengan enam kota pada enam pulau dengan 496 relawan, program ini kemudian diperluas ke 51 kota/kabupaten di 28 provinsi pada tahun 2017 dengan melibatkan 1.256 relawan. Pada tahun 2018, program ini mencakup 76 kota/kabupaten di 34 provinsi dengan 3.562 relawan dan mencapai lebih dari 58.799 siswa. Pada tahun 2019, kegiatan ini terus berlangsung di 60 kota/kabupaten dengan lebih dari 3.500 relawan. Para relawan, termasuk Menteri Keuangan dan jajarannya, akan turun langsung mengajar di sekolah-sekolah, baik secara *online* maupun *offline*. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Kemenkeu, APBN dan keuangan negara, profesi di Kementerian Keuangan, motivasi untuk berkontribusi kepada negeri, cinta tanah air, cinta kebersihan, dan gotong royong. Kegiatan ini dapat menjadi sarana pegawai Kemenkeu di seluruh Indonesia untuk menceritakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari kepada para siswa.

Kemenkeu Mengajar ke-9 (KM9)

Tahun 2024 ini merupakan kali ke-9 diadakannya Kemenkeu Mengajar. Kemenkeu Mengajar menjadi lebih dari sekadar program mengajar biasa. Program ini telah menjelma menjadi sebuah gerakan yang menyatukan para pegawai Kemenkeu dengan tekad yang sama yaitu mencerdaskan bangsa dan membangun generasi muda yang gemilang.

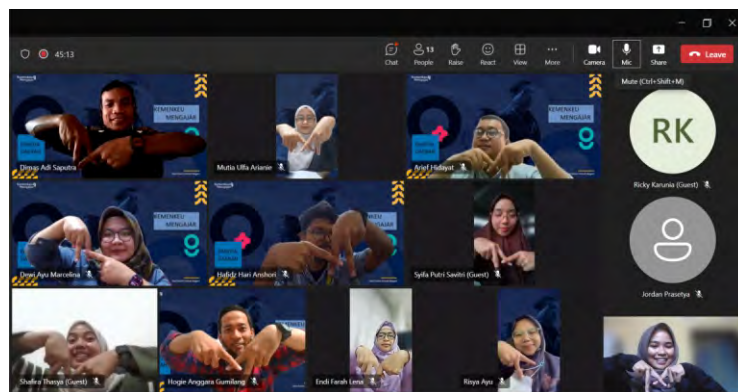
Tahun ini, Kemenkeu Mengajar resmi berada di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu. Hal ini menandakan komitmen yang semakin kuat dari Kemenkeu untuk menjadikan Kemenkeu Mengajar sebagai program unggulan dalam membangun SDM unggul dan mencerdaskan bangsa.

KM9 bukan hanya tentang menyampaikan materi peningkatan literasi keuangan, tetapi juga bertujuan untuk membangun interaksi yang positif dan inspiratif antara para relawan pengajar dengan para siswa. Melalui berbagai kegiatan edukatif yang menarik dan menyenangkan, KM9 diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan dan membuka wawasan para siswa terhadap dunia keuangan dan pembangunan bangsa.

Persiapan KM9

Kegiatan ini diawali dengan rekrutmen panitia pusat, koordinator daerah, relawan pengajar, relawan dokumentator, dan fasilitator. Tahun ini, KM9 berharap dapat menjaring lebih banyak relawan dan menyelenggarakan kegiatan mengajar di lebih banyak kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. KM9 akan dilaksanakan secara serentak selama satu hari di seluruh Indonesia. Hari Mengajar KM9 diselenggarakan pada Senin, 7 Oktober 2024 secara nasional di seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Kamis, 19 September 2024 terkhusus untuk Provinsi Bali, dikarenakan adanya Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Koordinator Daerah (Korda) bertugas untuk menyelenggarakan Kemenkeu Mengajar di lokasi yang telah diajukan oleh Korda. Korda membentuk tim Kemenkeu Mengajar Kota/Kabupaten dan membagi tugas antar anggota tim, tim tersebut merupakan Panitia Daerah (Panda). Panda terdiri dari koordinator dan wakil koordinator daerah, kesekretariatan (sekretaris dan bendahara), bidang acara daerah, bidang fasilitator dan sekolah daerah, bidang publikasi dan dokumentasi daerah, bidang humas daerah, serta bidang lainnya yang diperlukan.



Relawan KM9 merupakan para abdi negara yang menjadi perpanjangan tangan Kemenkeu untuk secara sukarela berbagi waktu dan tenaga dalam memberikan inspirasi, nilai positif, keceriaan, serta pengetahuan mengenai keuangan negara secara umum kepada para siswa sekolah di penjuru negeri. Para relawan tidak hanya sebatas pengajar yang menyampaikan materi tentang keuangan negara namun juga berperan menjadi fasilitator,

motivator, dan inspirator bagi para siswa. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, mereka membimbing para siswa untuk memahami materi, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menanamkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air.

Tak lupa, momen-momen keceriaan dan kebersamaan selama KM9 ini diabadikan dengan apik oleh para relawan dokumentator. Foto dan video yang mereka hasilkan menjadi saksi bisu semangat belajar dan keceriaan para siswa, sekaligus menjadi kenangan indah yang tak ternilai bagi para relawan dan seluruh pihak yang terlibat. Para relawan melaksanakan kegiatan ini tanpa menerima honor ataupun biaya perjalanan dinas, jadi memang semata-mata didorong oleh semangat sukarela, sinergi, dan dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan para Relawan Kemenkeu Mengajar menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi dan misi program ini.

Di Balik Layar KM9 Tangerang Selatan

Setelah daftar koordinator daerah diumumkan, para Korda membentuk Panda. Panda Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan rapat perdana secara *online* melalui *ms. Teams* pada sore hari. Selain itu, Panda Tangsel juga melaksanakan rapat rutin panitia daerah seminggu sekali untuk *update* persiapan yang telah dan akan berjalan. Agenda rapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga waktu dan tempat juga menyesuaikan, seperti rapat *online* maupun rapat onsite jika diperlukan.

Panda Tangsel juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Tangsel (untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Banten (untuk Sekolah Menengah Atas), serta Kementerian Agama Tangerang Selatan (permohonan izin atas dukungan Sekolah Islami). Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan dalam kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam hal ini, Panda Tangsel juga

melakukan *survey* sekolah yang akan menjadi tempat mengajar. Calon Sekolah Kolaborator yang setuju untuk mengikuti kegiatan Kemenkeu Mengajar akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke dinas terkait dengan nota dinas resmi sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan KM9 nantinya.

Koordinasi diperlukan dalam kelancaran kegiatan KM9 ini, sehingga kantor daerah dapat terinfokan terkait pelaksanaan KM9. Selain itu, koordinasi ini diharapkan mampu mendukung sarana dan prasarana yang nantinya diperlukan dalam kegiatan. Panda Tangsel juga berkoordinasi dengan kantor vertikal Kemenkeu yang ada di Banten. Panda Tangsel melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Wilayah DJKN Banten (Kantor Perwakilan Kementerian di Banten), Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pondok Aren, Politeknik Keuangan Negara STAN, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Banten.

Kumpul Relawan KM9 Tangerang Selatan

Setelah semua persiapan sarana dan prasarana terpenuhi, tiba saatnya menyambut para relawan dengan hati gembira. Panda Tangsel mengundang para relawan untuk dapat bergabung bersama dengan media *WhatsApp Group*. Relawan KM9 Tangsel berasal dari

Relawan Kemenkeu dan mahasiswa PKN STAN. Pada 31 Agustus 2024, telah dilaksanakan kegiatan kumpul relawan KM9 Tangsel secara *online*. Dalam pelaksanaan tersebut, disampaikan terkait hal-hal dasar pelaksanaan KM9 di Tangsel, yakni waktu pelaksanaan 7 Oktober 2024, kegiatan-kegiatan mendatang seperti pengisian *form* pilihan sekolah, informasi kebutuhan untuk mengajar, *survey* relawan ke sekolah mendekati hari mengajar, pendanaan kegiatan mengajar, dan lain sebagainya.

Tahun ini, KM9 Tangsel berkolaborasi dengan total sembilan sekolah, yang terdiri dari tiga Sekolah Dasar; Sekolah Insan Cendekia Madani (Primary School), SD N Jurangmangu Timur 02, dan SD IT Auliya, 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP);

“Tahun ini,
KM9 Tangsel
berkolaborasi
dengan
total sembilan
sekolah”

Sekolah Insan Cendekia Madani (Middle School), SMP N 6 Tangerang Selatan, SMP N 11 Tangerang Selatan, dan SMP N 18 Tangerang Selatan, serta 2 Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Insan Cendekia Madani (High School) dan SMA N 3 Tangerang Selatan.

Kendala Persiapan KM9 Tangel

Kendala pertama adalah jarak, dimana relawan yang mendaftar untuk mengikuti Kemenkeu Mengajar berasal dari satuan kerja dan lokasi tempat tinggal yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membuat patokan lokasi dalam pertemuan relawan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan adanya koordinasi dari pihak PKN STAN dan KPP Pondok Aren. Relawan KM9 Tangel dapat melaksanakan kegiatan pertemuan dengan meminjam ruang rapat di kantor tersebut, sehingga terdapat patokan yang jelas dan lebih resmi dalam pelaksanaan kegiatannya.



Kendala selanjutnya adalah *bonding*, meski sesama pegawai Kemenkeu dan mahasiswa PKN STAN adalah relawan, namun belum tentu saling mengenal. Bahkan, pengenalan dimulai sejak mengikuti kegiatan KM9 ini. Peran panitia daerah diperlukan untuk menghubungkan antar sesama relawan sehingga bisa saling berinteraksi guna koordinasi di hari mengajar nantinya.

Kendala ketiga adalah pilihan sekolah. Pilihan sekolah yang beragam dan keinginan relawan yang berbeda-beda menjadikan tidak semua kemauan relawan dapat terpenuhi. Dalam memilih sekolah, relawan mempunyai alasan masing-masing, seperti jarak rumah ke sekolah yang lebih dekat, jarak kantor ke sekolah yang lebih dekat, keinginan pilihan sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, dan

lain sebagainya. Dalam hal ini, Panitia Daerah KM9 Tangel memfasilitasi relawan untuk dapat menyampaikan aspirasinya melalui *plotting* sekolah mengajar, relawan dapat memilih dua pilihan sekolah, yang nantinya akan menjadi dasar *plotting* sekolah oleh panitia daerah. Panitia daerah semaksimal mungkin mengatur sekolah sesuai dengan pilihan relawan, sehingga hari mengajar dapat dilaksanakan dengan hati yang bahagia. Namun, hasil akhir dari *plotting* sekolah tersebut tetap berada di kewenangan panitia daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan mengajar sekolah.

Kemudian yang juga menjadi kendala adalah rapat *onsite* dan *survey* sekolah di hari kerja. Dalam hal perlunya koordinasi kegiatan antar panitia daerah, diperlukan agenda rapat rutin setiap minggunya menuju Hari Mengajar. Namun, tidak selamanya rapat *online* menjadi solusi ditengah kesibukan relawan. Kadang kala, panitia daerah harus melaksanakan rapat *onsite* dan *survey* sekolah untuk keperluan mengajar. *Survey* sekolah sebaiknya memang dilakukan ketika hari kerja sehingga dapat melihat secara jelas keadaan sekolah. Kebutuhan relawan untuk izin dari kantor kadang kala sulit dilakukan karena tidak adanya bukti resmi untuk disampaikan ke satuan kerja masing-masing relawan, sehingga Panitia Daerah KM9 Tangel memfasilitasi perizinan melalui surat tugas yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJKN Banten sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Banten. Disinilah pentingnya koordinasi dengan kantor-kantor vertikal kementerian keuangan, sehingga kantor-kantor dimaksud secara penuh mendukung kelancaran penyelenggaraan KM9 ini dengan baik.

Selanjutnya adalah masalah pendanaan. Kegiatan KM9 merupakan kegiatan non APBN, sehingga relawan yang bergabung diminta untuk membayar sejumlah iuran yang disepakati masing-masing relawan untuk kegiatan hari mengajar. Tidak adanya pendanaan dari Kemenkeu ini sudah disampaikan dari awal pengisian *form* pendaftaran relawan, sehingga pegawai yang mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi relawan juga setuju untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan KM9 Tangel ini.

Dan terakhir adalah permintaan khusus sekolah

kolaborator. Dengan berbagai karakteristik sekolah yang ada di Tangsel, perlunya penyesuaian khusus oleh sekolah untuk dapat mengikuti kegiatan KM9 Tangsel ini dengan baik. Penyesuaian ini disampaikan pihak sekolah kepada relawan sebelum hari mengajar sehingga kegiatan dapat sesuai harapan masing-masing pihak dan tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya.

Selain hal yang disebutkan diatas, rangkaian kegiatan KM9 tidak hanya di hari mengajar saja, namun akan ada kegiatan sebelum hari mengajar,

seperti Briefing Nasional Relawan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pusat KM9, dan *Briefing Daerah* KM9 Tangsel.

Sobat PP bisa melihat *update* kegiatan Kemenkeu Mengajar pada akun Instagram **@kemenkeumengajar** dan juga **@km.tangerangtangselsel**. Info selengkapnya juga bisa diakses pada laman <https://bppk.kemenkeu.go.id/kemenkeumengajar/>. Sampai bertemu di Hari Mengajar 7 Oktober 2024. ■ (Kasya)





SE-2/PP/2023

tentang Prosedur Penatausahaan Pengiriman
Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan
Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali

Informasi Kembali Pos: Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali



1 Pengumuman Salinan Putusan yang Kembali Pos

Jika Salinan Putusan Pengadilan Pajak atau Peninjauan Kembali dikembalikan (kembali pos) ke Sekretariat Pengadilan Pajak, maka Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengumumkan informasi tersebut di laman resmi untuk memberi tahu para pihak bahwa salinan putusan telah diterbitkan dan dikirim namun kembali pos.

2 Informasi yang Diumumkan

Laman Sekretariat Pengadilan Pajak menampilkan informasi berikut:

- Nama pihak yang bersengketa
- Nomor putusan
- Amar putusan
- Tanggal pengiriman pos awal
- Alamat tujuan pengiriman pos awal

3 Permohonan Pengiriman Ulang Salinan Putusan

- ▶ Pihak yang belum menerima salinan putusan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pengiriman ulang. Permohonan harus ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak dan mencantumkan nomor putusan yang diminta, disertai alamat pengiriman serta dokumen pendukung seperti fotokopi NPWP/ Surat Keterangan Terdaftar/ Surat Keterangan Domisili.
- ▶ Permohonan tertulis ditandatangani oleh:
 - Wajib Pajak atau pengurus berwenang (Pemohon Banding/Penggugat).
 - Pejabat terkait (Terbanding/Tergugat).

4

Prosedur Pengiriman Ulang Salinan Putusan

- Salinan putusan yang dikirimkan ulang harus dikirim melalui pos tercatat dan tidak dapat diambil langsung dari Pengadilan Pajak.
- Salinan putusan harus dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam surat permohonan pengiriman ulang salinan putusan.
- Alamat pengiriman ulang salinan putusan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, atau Surat Keterangan Domisili, atau dokumen resmi lainnya yang membuktikan domisili Pemohon.
- Jika Wajib Pajak atau pengurus menginginkan agar salinan putusan dikirimkan ke alamat selain yang tercantum dalam dokumen resmi, mereka harus melampirkan fotokopi dokumen yang membuktikan kewenangan untuk menandatangani dan mewakili Wajib Pajak dalam surat permohonan.

5

Konfirmasi Alamat Pengiriman

- Pemohon Banding atau Penggugat harus memberikan alamat sesuai NPWP atau alamat terbaru dalam Daftar Isian Surat Banding atau Gugatan.
- Majelis atau Hakim Tunggal akan memverifikasi identitas dan alamat Pemohon selama sidang.
- Panitera Pengganti mencatat dan mencantumkan hasil konfirmasi alamat dalam Berita Acara Sidang dan Konsep Putusan.

6

Penerbitan dan Penandasahan Fotokopi Salinan Putusan

- Penerbitan Fotokopi: Salinan putusan diterbitkan hanya sekali. Jika hilang atau rusak, ajukan permohonan fotokopi kepada Sekretaris Pengadilan Pajak dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- Penandasahan: Fotokopi salinan putusan hanya ditandasahkan untuk alat bukti di pengadilan Mahkamah Agung. Permohonan penandasahan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan penjelasan tujuan penggunaannya.

setpp.kemenkeu.go.id/peraturan/Details/95

MENGENAL SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK

Tentang SKSP

Surat Keterangan Sengketa Pajak atau SKSP adalah salah satu layanan yang disediakan Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai keterangan untuk para Wajib Pajak atas adanya sengketa pajak baik yang telah selesai maupun sedang berlangsung. Wajib Pajak yang tidak memiliki sengketa pun dapat mengajukan surat ini sebagai pernyataan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak memiliki sengketa di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, beberapa menyebut surat ini sebagai Surat Keterangan Bebas Perkara atau SKBP.

Layanan ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya para Wajib Pajak menggunakan surat ini untuk beberapa kepentingan seperti *legal due diligence*, audit perusahaan, hingga merger/akuisisi dan kepentingan khusus lainnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, 10120
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL:
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK
NOMOR KET- /SP/Wk/2024

Menindaklanjuti Surat Saudara *[Nama]* No. Ref.:

[Nama] tanggal 20 September 2024 hal permohonan surat keterangan
ada tidaknya perkara setelah dilakukan penelitian pada data di Sistem Informasi Sengketa Pajak

Persyaratan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKSP dengan memenuhi beberapa persyaratan persuratan yang diserahkan ke Set. PP. Persyaratan tersebut antara lain:

1. **Asli Surat Permohonan** dengan mencantumkan uraian tujuan yang jelas (Direktur atau Kuasa);
2. **Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan** dari pengadilan Pajak sesuai dengan uraian tujuan di poin 1 (Apabila tidak ada dapat diganti dengan asli pernyataan dari Pengurus Perusahaan/pemberi kuasa dan bermeterai);
3. **Asli Surat Kuasa** yang bermeterai (apabila dikuasakan);
4. **Asli Surat Kuasa Substitusi** yang bermeterai (apabila dikuasakan kembali);
5. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)** yang masih berlaku (apabila tidak ada dapat diganti fotokopi Nomor Induk Berusaha/NIB Perusahaan);
6. **Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas** dari Kementerian Hukum dan HAM (Untuk Perusahaan Berbadan Hukum);

7. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan

Terakhir Perusahaan yang mencatumkan nama pengurus yang menandatangani permohonan atau memberikan kuasa; dan

8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

untuk masing-masing pihak berikut:

- Badan Hukum (Perusahaan);
- Semua Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham yang tercantum di dalam akta;
- Semua pihak yang diberi kuasa dan tercantum dalam surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
- Pemohon.

Penerbitan dan Penggunaan SKSP

Setelah pengajuan persyaratan dipenuhi, SKSP akan diproses maksimal dalam empat belas hari hingga diterbitkan. Sehubungan dengan pola pengajuan sengketa pajak yang dinamis, Wajib Pajak pun dapat mengajukan permohonan SKSP ini tiga bulan setelah SKSP sebelumnya diterbitkan. ■ (ADP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, 10120
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL:
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK NOMOR KET- /SP/Wk/2024

Menindaklanjuti Surat Saudara

tanggal 20 September 2024 hal permohonan surat keterangan No. Ref.:
ada tidaknya perkara, setelah dilakukan penelitian pada data di Sistem Informasi Sengketa Pajak
Sekretariat Pengadilan Pajak, sejak 2019 hingga saat dikeluarkannya Surat Keterangan
Sengketa Pajak ini, bersama ini diterangkan bahwa:

Nama : ("Perseroan")
Alamat :
NPWP : Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia

"tidak terdaftar" dalam register sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Surat Keterangan Sengketa Pajak ini diterbitkan "semata-mata hanya untuk menyatakan ada atau tidaknya Banding dan/atau Gugatan namun tidak termasuk ada atau tidaknya kewajiban dan/atau pidana perpajakan yang bersangkutan".
Demikian Surat Keterangan

PROMOSI & MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SET.PP

Mutasi periode

31 Mei 2024

Jabatan sebelumnya:
**Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Informasi**

Subdirektorat
Pengembangan Sistem
Direktorat Teknologi
Informasi
Lembaga National
Single Window

Jabatan saat ini:
**Kepala Subbagian
Informasi & Publikasi**

Bagian TIK
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Roy
Abdur-
rachman
Pasha**



Jabatan sebelumnya:
**Kepala Subbagian
Rumah Tangga**

Bagian Umum
Kanwil DJBC Sumatera
Bagian Timur
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

Jabatan saat ini:
**Pembantu Sekretaris
Pengganti 2**

Sekretaris Pengganti
M VIIB
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Riki
Sentana
Akhsan**



Jabatan sebelumnya:
**Pembantu Sekretaris
Pengganti**

Sekretaris
Pengganti M XVIIIA
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

**Kepala Seksi
Pelayanan
Kepabeanan
& Cukai III**

KPPBC Tipe Madya
Pabean A Bogor
Kanwil DJBC Jawa Barat
DJBC

**Tuti
Sukmawati**



Promosi periode **2 Sept 2024**

Jabatan sebelumnya:
Kepala Bagian Umum

Bagian Umum
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

Wakil Sekretaris

Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Abdul
Azis Hady**



Jabatan sebelumnya:
Pelaksana

Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara

Jabatan saat ini:

Pembantu Sekretaris Pengganti 1

Sekretaris Pengganti M XVB
Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Ditta
Puspita
Ariesdewi**



Jabatan sebelumnya:
Pelaksana

Biro Advokasi
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

Kepala Subbagian Tata Usaha & Dukungan Layanan Pimpinan

Bagian Umum
Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Leila
Yuniar
Firdausi**



Jabatan sebelumnya:
Pelaksana

Biro Umum
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

Pembantu Sekretaris Pengganti 2

Sekretaris Pengganti M XIA
Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Sigit
Argo
Hananto**



Jabatan sebelumnya:
Pelaksana

Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

Kepala Seksi Piutang Negara II

Bidang Piutang Negara
Kanwil DJKN Aceh
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara

**Vigor
Arya
Danan
Jaya**



Mutasi periode

2 Sept 2024

Jabatan sebelumnya:
**Kepala Kantor Pengolahan
Data dan Dokumen
Perpajakan Jambi**
Direktorat Jenderal Pajak

Jabatan saat ini:
**Sekretaris Pengganti
M XVIII B**

Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

**Arief
Kurniadi**



Jabatan sebelumnya:
**Sekretaris Pengganti
M XVIII B**
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

**Kepala Kantor
Pelayanan**

KPP Pratama Tanjung
Pandan
Kanwil DJP Sumatera
Selatan Dan Kepulauan
Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Pajak

**Farchan
Ilyas**



Jabatan sebelumnya:
**Kepala Bagian Administrasi
Putusan Persidangan
dan Kepatuhan Internal**
Sekretariat
Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal

Jabatan saat ini:

**Kepala Bagian Bidang
Kepatuhan Internal**

Bidang Kepatuhan Internal
Kanwil DJBC Sumatera
Bagian Barat
Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai

**Sugeng
Meijanto**



“ Selamat atas
promosi/mutasinya
ke posisi yang baru.
Sukses selalu dan
selamat berkarya di
tempat kerja yang baru ”

WASES BARU, SEMANGAT BARU

Senin, 2 September 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Fungsional/Pejabat pada unit organisasi Non Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Abdul Azis Hady sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Pria yang akrab disapa Pak Azis ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Set. PP sehingga tak heran beliau memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Set. PP dan memiliki beberapa program kerja untuk segera diterapkan. Pada kesempatan kali ini, tim TCMedia berkesempatan melakukan wawancara singkat dengan Wakil Sekretaris baru Set. PP.



Bagaimana perasaan Bapak promosi menjadi Wakil Sekretaris di Set. PP ?

Saya merasa senang dan bersyukur atas amanat ini karena dengan adanya kenaikan jabatan ini, di mata manusia ada kenaikan derajat yang berefek pada kenaikan penghasilan. Namun di sisi lain, saya juga merasa khawatir. Pertanggungjawaban atas amanat ini tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt. Saya harus mampu menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai jabatan ini membuat saya lalai dan menjauh dari Allah Swt.

Siapa saja orang yang paling berperan dalam pencapaian karir Bapak?

Pertama adalah ayah saya yang mengajarkan saya bagaimana mengerjakan sesuatu dengan Ikhlas, benar, dan bertanggung jawab. Setiap ayah saya menyuruh saya melakukan sesuatu, ayah akan menanyakan kembali apa yang telah saya lakukan dan bagaimana reaksi orang terhadap pekerjaan saya. Sosok kedua adalah ibu saya. Ibu adalah orang yang mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang memberi manfaat kepada orang lain, karena di mata Allah Swt sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Menurut Bapak, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Set. PP saat ini?

Ada empat permasalahan utama yang sedang dihadapi Set. PP. Pertama terkait proses transisi, sebagaimana kita ketahui telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengharuskan peralihan kewenangan atas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal

31 Desember 2026. Permasalahan kedua adalah masih banyaknya tunggakan sengketa pajak. Permasalahan ketiga adalah banyaknya tunggakan berkas Peninjauan Kembali (PK). Dan terakhir permasalahan secara umum yang mencakup bagaimana Set. PP kedepannya.

Bagaimana bapak sebagai Wases mengatasi permasalahan tersebut?

Terkait permasalahan transisi dan bagaimana Set. PP kedepannya, Saya dan pimpinan lainnya terus mengawal proses yang sedang berlangsung, seperti berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal serta saya terus memantau isu-isu yang dimungkinkan terjadi, contohnya dalam waktu dekat akan ada pemerintahan baru, kita harus siap seandainya nanti akan dibentuk Badan Penerimaan Negara yang akan berefek pada Pengadilan Pajak nantinya.

Terkait permasalahan tunggakan sengketa pajak dan pengiriman berkas PK, saya bersama pimpinan juga berkoordinasi merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendorong penyelesaian sengketa pajak dan pengiriman berkas PK. Kami melakukan koordinasi baik dari hulu, pihak yang terlibat atas munculnya sengketa pajak yaitu DJP, DJBC, dan Pemda, serta hilir, pihak yang menerima berkas sengketa yaitu MA untuk kemudian dilakukan proses Peninjauan Kembali.

Apa saja program kerja jangka pendek Bapak yang dapat segera diterapkan?

Beberapa langkah konkret yang saya lakukan antara lain, setelah diamanatkannya jabatan ini, Saya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Pajak untuk mengambil alih beberapa tugas yang dalam beberapa bulan ini dikerjakan

Sekretaris seorang diri. Saya menginisiasi mengambil alih pekerjaan *clerical* sehingga Sekretaris akan lebih konsentrasi kepada tugas yang bersifat kebijakan. Langkah kongkret selanjutnya, saya terus mengawal transisi Pengadilan Pajak dengan terlibat di dalam Tim Transisi baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, untuk mengurangi tunggakan sengketa pajak dan pengiriman berkas PK sebelum 31 Desember 2026 yaitu Saya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem perpajakan.

Saat ini SDM Set. PP dihadapkan oleh ketidakpastian, adanya program Kemenkeu satu terkait mutasi dan promosi, serta adanya ketidakpastian status kepegawaian dan remunerasi setelah tanggal 31 Desember 2026, sebagai Wases, bagaimana Bapak menyikapi kegelisahan tersebut?

Terkait program Kemenkeu Satu perihal mutasi dan promosi, hal ini dikarenakan adanya suatu kebijakan pimpinan yang secara organisasi Kemenkeu dianggap baik, kedepan kebijakan ini akan semakin jelas arahnya. Kita harus menyikapi perubahan ini sebagai sesuatu yang baik sehingga kita bisa mempersiapkannya.

Terkait transisi, saya melihat apa yang kita hadapi sekarang sebagai wacana, segala sesuatu belum berubah. Perasaan khawatir yang berlebihan lah yang membuat masalah yang belum terjadi sudah menjadi suatu masalah. Isu-isu yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi demotivasi terlebih hal yang dikhawatirkan tersebut belum terjadi. Koordinasi yang telah dilakukan baik dari

pimpinan maupun anggota tim yang terlibat adalah salah satu upaya untuk memperjelas ketidakpastian menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita.

“ Isu-isu yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi demotivasi terlebih hal yang dikhawatirkan tersebut belum terjadi ”

Apa harapan bapak untuk Set. PP kedepannya?

Apapun yang terjadi dengan Set. PP kedepannya, kita harus siap menghadapainya. Kita boleh bersia-siap namun tidak boleh menyikapinya secara berlebihan seperti *overthinking* yang mengakibatkan penurunan kinerja ataupun demotivasi. Hal yang harus kita lakukan sekarang ialah bekerja dengan sungguh-sungguh membantu Pengadilan Pajak dalam mempercepat penyelesaian sengketa pajak.

Selanjutnya, dalam menjalankan amanah ini, dukungan dari para pimpinan, pejabat administrator, pejabat pengawas, pegawai, dan tenaga pendukung sangat Saya harapkan. Jika dalam melaksanakan tugas Saya melakukan kesalahan, silahkan ditegur. Saya sangat berharap dengan menjadi Wases, Saya menjadi orang yang kehadirannya bermanfaat bagi organisasi, para pegawai, dan masyarakat. ■ (Mega)

TRANSPORTASI PUBLIK: Solusi Mobilitas Kaum Urban

Jika ada satu hal yang dianggap paling menyebabkan bagi warga urban Jabodetabek, mungkin hal tersebut adalah kemacetan. Kemacetan akan selalu ditemui oleh warga urban di setiap harinya. Pada hari-hari kerja dari Senin hingga Jumat, kemacetan siap menyambut di pagi dan sore hari. Hal ini menjadi pemandangan yang wajar mengingat Jakarta sebagai pusat dari berbagai aktivitas warga urban Jabodetabek memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa pada malam hari dan hampir dua kali lipat pada siang hari akibat arus komuter, kota ini menghadapi tantangan besar dalam hal transportasi.

Setiap harinya, Jakarta menjadi tujuan bagi lebih dari 3,5 juta komuter dari kota-kota sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat sekitar 18,5 juta perjalanan yang terjadi setiap hari di Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas perjalanan ini dilakukan dengan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor yang berkontribusi signifikan terhadap kemacetan.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah salah satu masalah utama yang mempengaruhi produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup warganya. Kemacetan lalu lintas di Jakarta bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Bank Dunia mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar 100 triliun per tahun. Selain itu, kemacetan juga berkontribusi terhadap meningkatnya polusi udara, yang berdampak buruk pada kesehatan warga Jakarta. Dalam konteks inilah, peran transportasi umum menjadi sangat penting untuk mengurangi beban lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup di ibu kota.

Sudah banyak kota-kota besar di dunia yang berhasil mengurai kemacetan dan meningkatkan kualitas perjalanan komuting dengan beralih ke moda transportasi umum. Kota Oslo, Norwegia, telah mengurangi penggunaan mobil di pusat kota dengan menghapus tempat parkir dan memperluas jalur sepeda dan pejalan kaki. Upaya ini berhasil meningkatkan penggunaan transportasi publik yang kemudian dapat menekan angka emisi. Selain itu, di Kota Buenos Aires, Argentina, pemerintah berhasil mengurangi waktu perjalanan komuting dengan membuat jalur bus eksekutif di Avenida 9 de Julio, dan menjadi jalur bus terlebar di dunia. Hal ini berdampak besar bagi pengurangan waktu perjalanan, mengurai kemacetan, dan menurunkan emisi di pusat kota. Di Kota London, terdapat jaringan kereta bawah tanah, bus, dan kereta komuter yang luas, ditambah adanya kebijakan “*Congestion Charge*” atau biaya kemacetan, yang diterapkan di pusat kota London. Hasilnya, pada tahun 2022, lebih dari 50% perjalanan di London dilakukan dengan transportasi umum.

Lalu, bagaimana dengan Kota Jakarta? Jakarta sebagai kota metropolitan yang terhubung langsung dengan berbagai kota lain di sekitarnya, telah memiliki moda transportasi yang mampu diandalkan sebagai sarana mobilitas kaum urban. Berikut TCMedia mencoba mengulas beberapa diantaranya.

Transjakarta, layanan bus *rapid transit* ini adalah salah satu tulang punggung transportasi umum di Jakarta. TransJakarta memiliki lebih dari 250 rute yang menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta dan pada Maret 2024, jumlah penggunaannya mencapai sekitar 30,1 juta orang. Para komuter dapat merasakan pengalaman menggunakan bus dalam kota dengan waktu tempuh yang lebih singkat karena Transjakarta memiliki jalurnya sendiri sehingga bisa lebih leluasa bergerak dalam kemacetan.

KRL Commuter Line, Kereta Rel Listrik (KRL) menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan lebih dari sembilan ratus perjalanan per hari, KRL menjadi salah satu moda transportasi yang paling efisien untuk perjalanan jarak jauh. Pengguna KRL pada bulan Juni 2024 mencapai 26,6 juta orang. Dengan angka pengguna yang sangat besar ini, bersiap untuk merasakan sempit dan berdesakannya ketika menggunakan moda transportasi ini pada jam-jam sibuk saat pergi dan pulang kerja.

MRT Jakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) adalah salah satu proyek transportasi paling ambisius di Jakarta. Dengan rute yang menghubungkan Lebak Bulus di selatan dengan Bundaran HI di pusat kota, MRT telah mengurangi waktu tempuh secara signifikan bagi para komuter. Pengguna MRT pada bulan Maret 2024 mencapai 2,9 juta penumpang. Angka ini tergolong sedikit dibandingkan moda transportasi lainnya karena MRT hanya melayani rute pendek dan hanya di dalam kota Jakarta saja. Dengan kondisi ini, pengalaman menggunakan MRT lebih menyenangkan karena terasa lebih lengang dan kondusif.

LRT Jakarta, Lintas Rel Terpadu (LRT) adalah moda transportasi baru yang diharapkan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta. Meskipun rutenya masih terbatas, LRT menjadi salah satu alternatif transportasi yang efisien. Jumlah penumpang pada Maret 2024 masih tergolong paling sedikit di antara moda transportasi lainnya, yaitu 92 ribu penumpang. Pengalaman menggunakan LRT kurang lebih sama dengan MRT, memiliki konsep kereta yang cepat dan masih lengang untuk digunakan pada jam-jam sibuk yaitu saat berangkat dan sepulang kerja.

Berdasarkan hasil Survei Komuter Jabodetabek Tahun 2023, dari keseluruhan jumlah komuter, pengguna transportasi umum hanya sebesar **19,5%** saja, sedangkan pengguna kendaraan

pribadi mencapai **79%**. Dengan melihat angka ini, pantas saja kondisi kemacetan tidak menunjukkan penurunan sama sekali sebab mayoritas komuting masih dilakukan dengan kendaraan pribadi yang tidak efisien karena memakan ruas jalan dengan lebih besar dibandingkan dengan kendaraan umum. Alasan tertinggi yang menjadi faktor utama tidak menggunakan transportasi umum adalah tidak praktis. Bisa jadi alasan ketidakpraktisan ini benar adanya, jika kita tidak mempersiapkan dan membiasakan diri untuk menggunakan transportasi umum. Berikut beberapa tips dan trik agar perjalanan komuting kita tetap nyaman dan praktis.

Pertama, rencanakan perjalanan anda. Gunakan aplikasi seperti Google Maps atau aplikasi transportasi lokal untuk merencanakan rute Anda. Ini akan membantu Anda memilih moda transportasi yang paling efisien dan menghindari rute yang terlalu padat. **Selanjutnya**, gunakan kartu elektronik. Untuk menghemat waktu, pastikan Anda menggunakan kartu elektronik seperti e-money atau kartu JakLingko untuk membayar transportasi umum. Selain itu, bisa juga menggunakan *e-wallet* lain yang dapat digunakan pada moda transportasi yang dipilih. Ini akan mempercepat proses masuk dan keluar dari stasiun atau halte.

Ketiga, bawalah hiburan terbaik versi anda. Untuk mengisi waktu saat berada di transportasi umum, bawalah buku, siapkan *podcast*, atau *playlist* musik favorit Anda. Ini bisa membantu membuat perjalanan lebih menyenangkan. Dan yang terakhir adalah gunakan pakaian yang nyaman. Kenakan pakaian yang nyaman akan membantu mobilitas anda pada aktivitas komuting menggunakan transportasi publik. Pilihan baju, celana, bahkan sepatu dapat meningkatkan kenyamanan ketika menggunakan transportasi publik.

Mari menjadi bagian dari solusi. Yuk mulai menggunakan transportasi publik! ■ (Heru)

MENJAGA ORGANISASI DARI ANCAMAN SIBER DENGAN MENERAPKAN *JOIN DOMAIN*

Pada era digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu prioritas utama bagi organisasi mana pun. Di tengah meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks, upaya untuk melindungi perangkat dan data organisasi harus terus diperkuat. Salah satu langkah penting yang sangat efektif adalah penerapan *join domain* pada seluruh perangkat kantor, baik itu *desktop* maupun laptop.

Pentingnya Penerapan *Join Domain* dalam Mitigasi Serangan Siber

Join domain adalah proses mengintegrasikan perangkat ke dalam sebuah *domain* yang dikelola oleh organisasi. Dengan menerapkan *join domain*, perangkat tidak lagi beroperasi secara individual melainkan sebagai bagian dari jaringan yang dikendalikan secara terpusat. Hal ini memberikan sejumlah manfaat dari sisi keamanan informasi.

Pertama, *join domain* memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang konsisten di seluruh perangkat yang terhubung. Misalnya, administrator jaringan dapat mengelola hak akses pengguna, menerapkan enkripsi, dan memantau aktivitas jaringan secara efektif. Dengan pengelolaan yang terpusat ini, potensi kebocoran data dan akses tidak sah dapat diminimalisir.

Kedua, *join domain* membantu memitigasi serangan siber dengan lebih efektif. Ketika perangkat berada di luar *domain*, mereka lebih rentan terhadap serangan seperti *malware*, *phishing*, atau *ransomware* yang dapat menyebar ke seluruh jaringan organisasi. Namun, dengan *join domain*, perangkat tersebut dapat diawasi dan dilindungi secara proaktif, sehingga potensi serangan bisa dicegah sebelum merusak sistem yang lebih luas.

Join domain: Langkah Kecil dengan Dampak Besar

Meskipun terlihat sederhana, penerapan *join domain* ini sebenarnya merupakan langkah yang sangat signifikan dalam pencegahan serangan siber. Pada banyak organisasi, *join domain* sering kali dianggap remeh karena tidak langsung terlihat manfaatnya dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, *join domain* adalah fondasi yang kuat untuk membangun sistem keamanan yang tangguh.

Perlu diingat bahwa serangan siber terhadap sebuah organisasi sering kali dimulai dari perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir untuk operasional organisasi sehari-hari, baik itu laptop atau *desktop* yang keamanannya tidak dikelola dengan baik. Dari perangkat inilah, penyerang bisa menyusup ke dalam jaringan dan menimbulkan kerusakan yang luas. Dengan *join domain*, potensi ini bisa diminimalkan, karena setiap perangkat yang terhubung ke *domain* akan mendapatkan proteksi yang sama.

Kesimpulan

Penerapan *join domain* adalah langkah sederhana namun sangat efektif sebagai salah satu upaya melindungi organisasi dari ancaman siber. Dengan kebijakan keamanan yang konsisten dan pengelolaan terpusat, risiko serangan dapat diminimalisir, dan organisasi dapat memastikan bahwa data serta informasi penting tetap aman. ■

(Rid)

It's TACO Time!

INTEGRITAS



@ridwan firmansyah